



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

RENSTRA

BPFK JAKARTA

2020 - 2024

WWW.BPFKJAKARTA.OR.ID

Kata Pengantar

Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi pejabat serta pegawai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan program tahunan BPFK Jakarta dalam kurun waktu 2020-2024. Penyusunan RSB BPFK Jakarta ini telah didasari atas keterkaitan dengan RSB Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, RSB Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dan arah pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Selain itu RSB BPFK Jakarta ini disusun sebagai kewajiban bagi Instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RI Nomor HK.02.02/II/2627/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) UPT Vertikal Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rencana Strategi Bisnis (RSB) ini terdiri dari 6 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut, **bab pertama** pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan program, **bab kedua** menggambarkan kinerja saat ini, **bab ketiga** berisi arah dan prioritas strategi, benchmarking, analisa SWOT, diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis, analisa TOWS dan rancangan peta strategi balanced scorecard (BSC), **bab keempat** menjelaskan indikator kinerja utama dan program kerja strategis, matrik dan kamus IKU, dan program kerja strategis. **Bab kelima** menguraikan analisa dan mitigasi resiko, identifikasi dan penilaian tingkat resiko dan rencana mitigasi resiko. **Bab keenam** menjelaskan proyeksi financial yang berisi estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran, dan rencana pendanaan.

Harapan Kami Rencana Strategi Bisnis (RSB) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pejabat dan pegawai BPFK Jakarta, maupun pihak-pihak yang terkait sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun pelaksanaan program tahunan

Jakarta, Desember 2019

Kepala Balai Pengamanan Fasilitas
Kesehatan (BPFK) Jakarta



Prastowo Nugroho, MHA
NIP. 196306121989031003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Rencana Strategi Bisnis	7
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Sistematika Laporan	8
BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI	9
2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan	9
2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan	13
BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS	15
3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai	15
3.2 Aspirasi Stakeholder Inti	16
3.3 Tantangan Strategis	17
3.4 Benchmarking	17
3.5 Analisa Swot	18
3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis	19
3.7 Analisa Tows	24
3.8 Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC) ...	26
BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS	31
4.1 Matrik IKU	31
4.2 Kamus IKU	32
4.3 Program Kerja Strategis	42
BAB V ANALISA DAN MITIGASI RESIKO	46
5.1 Identifikasi Risiko	46
5.2 Penilaian Tingkat Risiko	47
5.3 Rencana Mitigasi Risiko	48
BAB VI PROYEKSI FINANSIAL	50
6.1 Estimasi Pendapatan	50
6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran	52
6.3 Rencana Pendanaan	56
BAB VI PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan.....	11
Gambar 2.2 Produksi Jenis Layanan Jasa	13
Gambar 3.2 Diagram Kartesisu	20
Gambar 3.3 Matrik Internal Factors Evaluation.....	20
Gambar 3.4 Posisi bersaing BPFK.....	23
Gambar 3.6 Peta Rancangan BSC.....	27

DAFTAR TABEL

	Hal
Gambar 2.3 Kinerja aspek keuangan.....	13
Gambar 2.4 Capaian Kinerja Keuangan	14
Gambar 3.1 Aspek Stakholder Inti	16
Gambar 3.2 Diagram Kartesisu	20
Gambar 3.3 Matrik Internal Factors Evaluation.....	20
Gambar 3.4 Posisi bersaing BPFK.....	23
Gambar 3.5 Analsi Matrik Swot.....	24
Gambar 3.7 Sasaran Strategis.....	27
Gambar 3.8 Indikator Kinerja.....	27
Gambar 3.9 Target KPI.....	31
Gambar 3.10 Kamus IKU.....	32
Gambar 4.1 Program Kerja Strategis.....	43
Gambar 5.1 Identifikasi Resiko.....	46
Gambar 5.2 Penilaian Tingkat Resiko.....	47
Gambar 5.3 Rencana Mitigasi Resiko.....	49
Gambar 6.1 Estimasi Pendapatan.....	51
Gambar 6.2 Estimasi Anggaran Operasional.....	52
Gambar 6.3 Estimasi Anggaran Pengembangan.....	54
Gambar 6.4 Rencana Pendanaan.....	56
Grafik 2.1 Capaian Kinerja.....	14
Grafik 6.1 Estimasi Anggaran Operasional.....	52
Grafik 6.2 Estimasi Anggaran Pengembangan.....	54
Grafik 6.3 Rencana Pendanaan.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan public selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-4 (2020-2024), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan lajup ertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 19

berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau”. Untuk itu diperlukan tersedianya alat kesehatan, sarana dan prasarana yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yaitu alat kesehatan yang terjamin ketelitian, ketepatan dan keamanan penggunaannya, maka perlu pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi.

B. Tujuan Rencana Strategi Bisnis

Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah :

Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan.

1. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BPFK Jakarta
2. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPFK Jakarta dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan
3. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti UPT vertikal.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Rencana Strategi Bisnis BPFK Jakarta adalah :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan latarbelakang penyusunan program, maksud dan tujuan, dasar hukum, dan sistematika laporan.

Bab II. Gambaran Kinerja Saat Ini

Menguraikan gambaran kinerja saat ini dilihat dari aspek pelayanan dan aspek keuangan.

Bab III. Arah dan Prioritas Strategis

Menjelaskan arah dan prioritas strategis, rumusan pernyataan visi, misi, dan tata nilai, aspirasi stakeholders inti, tantangan strategis, benchmarking, analisa SWOT, diagram kartesius pilihan prioritas strategis, analisa TOWS, dan rancangan peta strategi balanced scorecard (BSC).

Bab IV. Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis

Menerangkan indicator kinerja utama dan program kerja strategis, matrik dan kamus IKU, dan program kerja strategis.

Bab V. Analisa dan Mitigasi Risiko

Menguraikan analisa dan mitigasi risiko, identifikasi dan penilaian tingkat risiko, dan rencana mitigasi risiko.

Bab VI. Proyeksi Finansial

Menjelaskan proyeksi finansial yang berisi estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran, dan rencana pendanaan.

Bab VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

Peningkatan kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dan untuk mewujudkan rencana strategi bisnis suatu instansi harus memiliki kinerja pelayanan dan keuangan yang baik.

A. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

BPFK Jakarta menyediakan pelayanan penunjang bagi fasilitas pelayanan kesehatan berupa:

1. Pelayanan Dalam Bidang Non Radiasi

Untuk mengurangi resiko yang timbul akibat penggunaan alat kesehatan maka wajib dilakukan pemeliharaan serta pengujian dan kalibrasi secara berkala. Pelayanan dalam bidang non radiasi terdiri dari:

- a. Pelayanan pengujian dan / kalibrasi alat kesehatan dan besaran standar
- b. Pengujian dan / Inspeksi Sarana & Prasarana

2. Pelayanan Dalam Bidang Radiasi

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi pasien dan petugas dari resiko yang timbul akibat penggunaan peralatan kesehatan/kedokteran yang bersumber dari radiasi, maka BPFK Jakarta menyelenggarakan pelayanan berkenaan dengan proteksi radiasi pada sarana pelayanan kesehatan berupa :

a. Pemantauan Dosis Radiasi Perorangan

Melayani pembacaan dosimetri personal Film Badge yang mengacu kepada Standar Internasional.

b. Uji Kesesuaian X-Ray

Melayani pengujian yang memastikan pesawat sinar x dalam kondisi handal, memenuhi peraturan perundang-undangan termasuk paparan radiasi.

c. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi

Melayani kalibrasi keluaran Radiasi Pesawat Radioterapi dan Dosimetri, termasuk Surveymeter.

Tingkat capaian volume kegiatan layanan BPFK Jakarta pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini :

Tabel 1 Capaian Kinerja Pelayanan

No.	KPI	PIC	Baseline	Target					Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
KPI1	Prosentase institusi pengujian merujuk ke BPFK Jakarta	Kepala	70%	70%	80%	82%	84%	100%	100%	125%	99%	110%	96%
KPI2	Indeks kepuasan pelanggan												
	a. Internal	Kasi TAOP		75%	79%	81%	85%	87%	75%	101%	73%	82%	78%
	b. Eksternal	Kasi TAOP	72%	74%	78%	80%	82%	85%	74%	76,73%	95%	96%	88%
KPI3	Prosentase RS rujukan nasional dan regional yg dilayani	Kasi YANTEK	60%	65%	70%	75%	80%	85%	100%	129%	120%	106%	100%
KPI4	Jumlah Akreditasi	Kasi TAOP	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
KPI5	Terakreditasi ISO 17025	Kasi Taop	26%	28%	30%	31%	33%	34%	100%	100%	116%	115%	121%
KPI6	Prosentase peserta (institusi pengujian) uji profisiensi	Kasi BIMTEK	70%	70%	80%	82%	84%	100%	100%	113%	99%	101%	96%
KPI7	Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai Jadwal	Kasi Yantek	66%	70%	75%	80%	85%	90%	53%	71%	101%	95%	84%
KPI8	Penerbitan sertifikat/LHU	Kasi Yantek	74%	82%	84%	86%	88%	90%	49%	107%	107%	50%	88%
KPI9	Prosentase respon terhadap keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti	Kasi TAOP	90%	91%	93%	95%	97%	100%	100%	57%	102%	94%	100%
KPI10	Jenis pelayanan kalibrasi	Kasi TAOP	113	114	117	120	123	125	100%	105%	103%	100%	100%

No.	KPI	PIC	Baseline	Target					Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
KPI11	Jumlah alat yang diuji dan dikalibrasi	Kasi yantek	6392	7600	7700	7800	7900	8000	190%	190%	138%	139%	166%
KPI12	Kesesuaian perencanaan dengan realisasi E-Planing	Kasubag TU	90%	95%	100%	100%	100%	100%	78%	81%	80%	89%	94%
KPI13	Jumlah program pemantauan mutueksternal	Kasi TAOP	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
KPI14	Prosentase temuan audit yang ditindaklanjuti	Kasi TAOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	82%
KPI15	Jumlah SOP yang diperbaiki	Kasi TAOP	5	5	5	5	5	5	100%	140%	100%	160%	100%
KPI16	Jumlah MOU kerjasama yang terlaksana	Kasi BIMTEK	3	6	8	10	12	12	100%	100%	130%	100%	108%
KPI17	Jumlah institusi penguji yang mendapat pembinaan	Kasi BIMTEK	18	18	18	18	18	18	130%	133%	139%	100%	106%
KPI18	Tingkat SKP	Kasubag TU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KPI19	Ketepatan kalibrasi alat ukur sesuai jadwal	Kasi TAOP	81%	82%	84%	86%	88%	90%	82%	117%	69%	108%	95%
KPI20	Tingkat keandalan alat kalibrator	Kasi TAOP	97%	97%	98%	98%	98%	100%	98%	100%	100%	87%	94%
KPI21	Level integrasi ICT	Kasubag TU	50%	60%	80%	100%	100%	100%	67%	102%	88%	100%	100%
KPI22	Prosentasi peningkatan kompetensi staff	Kasi BIMTEK	50%	60%	70%	75%	80%	100%	65%	104%	101%	106%	93%
KPI23	Pemenuhan LAKIP	Kasubag TU	96,7	97	97	97	97,5	97,5	95,31	99%	99%	100%	100%
KPI24	Pendapatan PNBP	Kasubag TU	5,8M	5,8M	6M	6,5M	7M	7,5M	137%	125%	112%	113%	118%

Tabel2 Produksi Jenis Layanan Jasa

NO	Jenis Layanan Jasa	Satuan	Produksi Layanan Jasa					Keterangan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Alat yang di uji dan dikalibrasi	Alat	14.387	14.656	19.357	20.188	30.020	

Grafik 1 Tren Layanan Alat yang diuji dan kalibrasi



B. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan

BPFK Jakarta dalam menjalankan operasional kegiatannya dibiayai dari dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut disajikan perkembangan PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir :

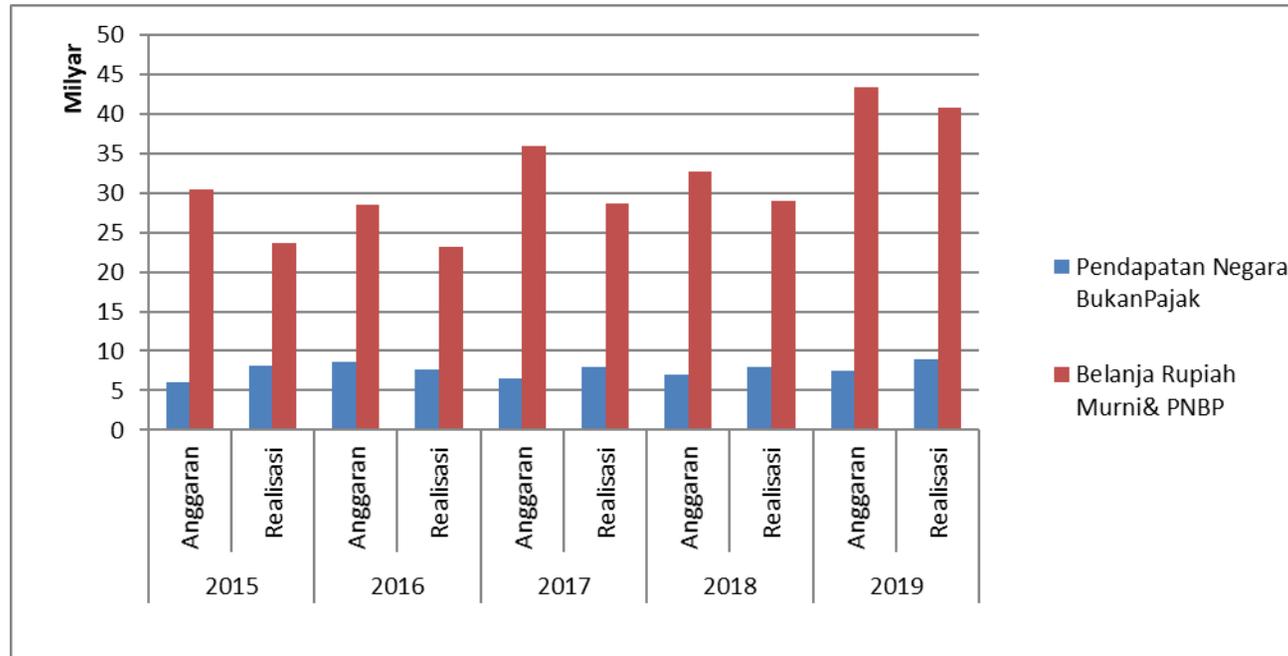
Tabel3 Kinerja Aspek Keuangan

No.	SUMBER DANA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi APBN (Rupiah Murni)	17,122,549,435	19,400,927,197	18,334,354,808	24,513,518,572	24,072,580,842
	Belanja Pegawai	4,427,374,235	4,789,099,285	6,141,011,873	5,462,057,572	9,823,274,848
	Belanja Barang (Operasional + Non Operasional)	5,881,228,300	5,608,150,606	6,672,355,592	9,017,952,130	7,790,128,890
	Belanja Modal	6,813,946,900	9,003,677,306	5,520,987,343	10,033,508,870	6,459,177,104
2	Realisasi PNBP	4,021,907,332	4,238,722,427	5,099,230,307	4,239,098,691	4,944,355,894
	Belanja Pegawai					
	Belanja Barang	4,021,907,332	4,238,722,427	5,099,230,307	4,239,098,691	4,944,355,894
	Belanja Modal					
3	Jumlah Realisasi (APBN+PNBP)	21,144,456,767	23,639,649,624	23,433,585,115	28,752,617,263	29,016,936,736

Tabel4 Capaian Kinerja Keuangan

TAHUN	2015		2016		2017		2018		2019	
Target & Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak	6.000.000.000	8.217.344.605	8.640.000.000	7.589.850.000	6.500.000.000	7.974.800.000	7.000.000.000	7.979.040.000	7.500.000.000	8.895.665.400
Anggaran & Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Rupiah Murni & PNPB	30.427.665.000	23.639.649.624	28.490.950.000	23.121.842.984	35.896.017.000	28.752.617.263	32.700.646.000	29.016.936.736	43.372.625.000	40.810.947.976

Grafik1 Capaian Kinerja Keuangan



BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

A. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai

Visi BPFK Jakarta tahun 2024

“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Adapun misi BPFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini ;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan ;
3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

Tata Nilai : (SPIRIT)

Keberhasilan pencapaian visi dan misi, perlu ditanamkan nilai-nilai agar pelaksanaan tugas berjalan lebih optimal sesuai dengan yang diinginkan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah :

1. Sinergi
2. Profesional
3. Integritas
4. Responsif
5. Inovatif
6. Teliti

B. Aspirasi Stakeholders Inti

Analisis aspirasi stakeholders inti dapat terlihat pada table berikut ini :

Tabel 5 Aspirasi Stakeholders Inti

No	Komponen Stakeholders Inti	Harapan	Kekhawatiran
1.	Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes	<p>Terlaksananya pengujian dan kalibrasi setiap peralatan medik dan inspeksi sarana dan sarana di Rumah Sakit di 9 propinsi sesuai dengan UU RI No.44 Th 2009</p> <p>Tupoksi BPFK dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan secara optimal sesuai dengan Permenkes No.2351 th 2011 dan Permenkes No. 54 tahun 2015</p> <p>Menjadi institusi penguji yang membina institusi penguji lainnya (Menjadi rujukan nasional)</p>	<p>Tidak setiap peralatan medik di RS dapat di lakukan pengujian, kalibrasi dan inspeksi</p> <p>Tupoksi BPFK belum dapat dilaksanakan secara optimal</p>
2.	Pelanggan	<p>Mendapatkan pelayanan pengujian/kalibrasi yang berkualitas dan tepat waktu sesuai standar pelayanan minimal serta tarif yang kompetitif</p> <p>Tersedianya ruang lingkup layanan sesuai dengan jenis alat kesehatan yg digunakan di Fasyankes.</p> <p>Tersedianya lembaga sertifikasi produk alat kesehatan di dalam negeri</p>	<p>Lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan jadwal pelayanan.</p>
3.	Karyawan	<p>Tersedianya ruang lingkup layanan sesuai dengan jenis alat kesehatan yg digunakan di Fasyankes.</p> <p>Peningkatan kompetensi Staf Fungsional yang tersertifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi alat kesehatan terkin.</p>	<p>Tidak tersedianya Lembaga pendidikan/pelatihan kompetensi yang ada didalam negeri.</p>

4.	Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan Lainnya	BPFK Jakarta dapat berperan sebagai institusi penguji rujukan, baik sebagai rujukan pelayanan maupun sebagai rujukan standar. Terlaksananya pembinaan mutu pengujian kalibrasi inspeksi Sarana Prasarana Alat kesehatan bagi institusi pengujian fasilitas kesehatan	Adanya keraguan dari Institusi pengujian fasilitas kesehatan terhadap mutu pelayanan uji/kalibrasi yang digunakan.
----	---	---	--

C. Tantangan Strategis

1. Meningkatkan jumlah SDM BPFK untuk mampu optimal melayani 9 propinsi (**1.028 Rumah sakit, 3.510 puskesmas dan 486 laboratorium kesehatan**).
2. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut SDM BPFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
3. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
4. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat. Mengacu kepada UU. No. 44 tahun 2009 dan permenkes No. 54 tahun 2015 bahwa semua peralatan kesehatan di Fasyankes harus dilakukan pengujian, kalibrasi dan inspeksi sarana dan prasarana alat kesehatan.
5. Mendukung terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit yang salah satunya adalah terkalibrasinya peralatan kesehatan.
6. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.

D. Benchmarking

Pengembangan jejaring perlu didukung dengan kebutuhan pengguna jasa serta dikenalnya kemampuan lembaga/instansi lain yang spesifik dan kontribusinya bagi terwujudnya pelayanan jasa yang diberikan oleh BPFK Jakarta. Pengembangan jejaring ini perlu terjalin dalam suasana yang saling menguntungkan dan saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jejaring yang dikembangkan BPFK Jakarta berhubungan dengan peluang pasar, teknologi, informasi, keahlian serta penyediaan dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Dengan jejaring ini, peningkatan pendapatan dari jasa pelayanan dan perluasan lingkup pelayanan jasa dapat dicapai lebih cepat dengan kualitas pelayanan yang memuaskan serta efisien, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing jasa pelayanan yang diberikan.

Adapun benchmarking BPFK Jakarta antara lain :

1. BATAN sebagai rujukan nasional alat ukur radiasi alasannya karena BATAN telah ditetapkan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) sebagai secondary laboratory untuk alat ukur radiasi.
2. Laboratorium SNSU
3. BPPT
4. Kementerian ESDM
5. ANSI/AAMI
6. ASTM
7. PPSDM

E. Analisa SWOT

Hasil analisis SWOT BPFK Jakarta menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dapat dijadikan modal untuk mengembangkan diri. Berikut analisis SWOT BPFK Jakarta :

Faktor–faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman BPFK Jakarta :

1. Peluang (Opportunity)
 - a. Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia
 - b. Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman
 - c. Bertambahnya jumlah Fasyankes yang mengajukan akreditasi
 - d. Adanya kewajiban pengujian, kalibrasi dan inspeksi SPA
 - e. Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alkes
2. Ancaman (Threat)
 - a. Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan terkait penerbitan sertifikat/laporan hasil SPA
 - b. Terbatasnya formasi SDM/PNS berkualifikasi teknis untuk penempatan di BPFK Jakarta
 - c. Alokasi anggaran untuk pengujian / kalibrasi di fasyankes (pelanggan) belum menjadi prioritas.
 - d. Terbatasnya dokumen referensi / standar acuan pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, dan inspeksi
 - e. Terbatasnya penyelenggara pelatihan kompetensi teknis khusus di dalam negeri
 - f. Belum adanya regulasi yang mewajibkan transfer teknologi SPA
 - g. Ketatnya persaingan dengan institusi pengujian sejenis pada lingkup nasional dan regional
 - h. Penerapan regulasi tentang pengujian dan kalibrasi SPA belum optimal.

Faktor-faktor yang membentuk Kekuatan dan Kelemahan BPFK Jakarta:

1. Kekuatan (Strength)
 - a. Kedudukan sebagai Instansi milik pemerintah memposisikan BPFK sebagai rujukan nasional
 - b. BPFK Jakarta telah memperoleh akreditasi ISO 17025 dan 17020 dari KAN
 - c. SDM yang kompeten dan tersertifikasi
 - d. Memiliki program peningkatan mutu SDM
 - e. Memiliki tarif yang kompetitif
 - f. Memiliki peralatan yang memadai dalam segi jumlah jenis dan teknologi
 - g. Memiliki ruang lingkup akreditasi terbanyak dibanding institusi sejenis

2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Belum terinternalisasi nilai-nilai visi bersama sebagai acuan kerja
 - b. Belum optimalnya sistem informasi manajemen dalam menunjang fungsi pelayanan
 - c. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualifikasi sesuai kebutuhan BPFK Jakarta
 - d. Sistem insentif belum berbasiskan kinerja
 - e. Tata kelola keuangan belum fleksibel dan mandiri
 - f. Sarana dan prasarana belum memadai
 - g. Belum optimal mekanisme penjadwalan dan respon time pelayanan

F. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis

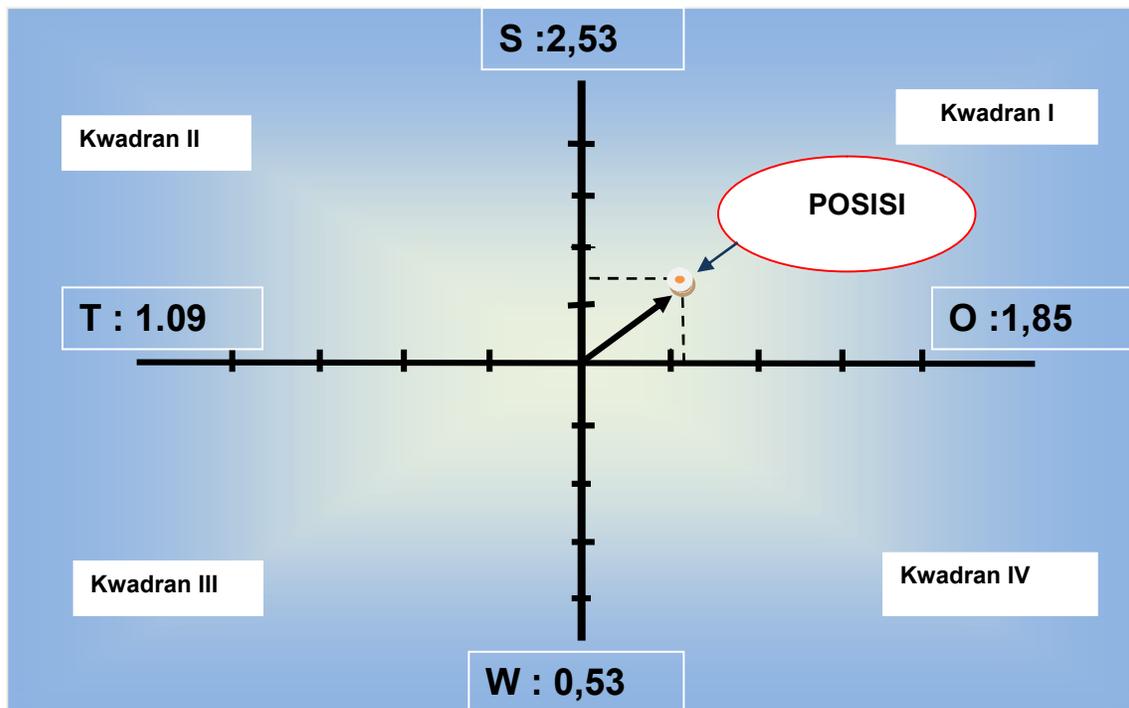
Diagram Kartesius akan menggambarkan daya saing BPFK Jakarta dalam memenuhi visi dan misi pada kurun waktu periode RENSTRA.

Analisis Posisi Bersaing BPFK Jakarta Berada pada Kwadrant I

$$\text{Kekuatan} - \text{Ancaman} = 2,53 - 1,09 = 1,44$$

$$\text{Peluang} - \text{Kelemahan} = 1,85 - 0,53 = 1,32$$

Gambar 1 Tipe Strategi Untuk Posisi Bersaing



Analisis Posisi Bersaing

Tabel 6 MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)

No	Faktor KEKUATAN Kritis	Bobot-1	Bobot-2	Skala (1-4)	(Bobot-2)x (Skala)
1	Kedudukan sebagai Instansi milik pemerintah memposisikan BPFK sebagai rujukan nasional	4	0,11	4	0,44
2	BPFK Jakarta telah memperoleh akreditasi ISO 17025 dan 17020 dari KAN	4	0,11	4	0,44
3	SDM yang kompeten dan tersertifikasi	4	0,11	4	0,44
4	Memiliki program peningkatan mutu SDM	3	0,08	3	0,25
5	Memiliki tariff yang kompetitif	3	0,08	3	0,25
6	Memiliki peralatan yang memadai dalam segi jumlah jenis dan teknologi	4	0,11	4	0,44
7	Memiliki ruang lingkup akreditasi terbanyak dibandingin stitusi sejenis	3	0,08	3	0,25
Jumlah		25	Skor Faktor		2,53

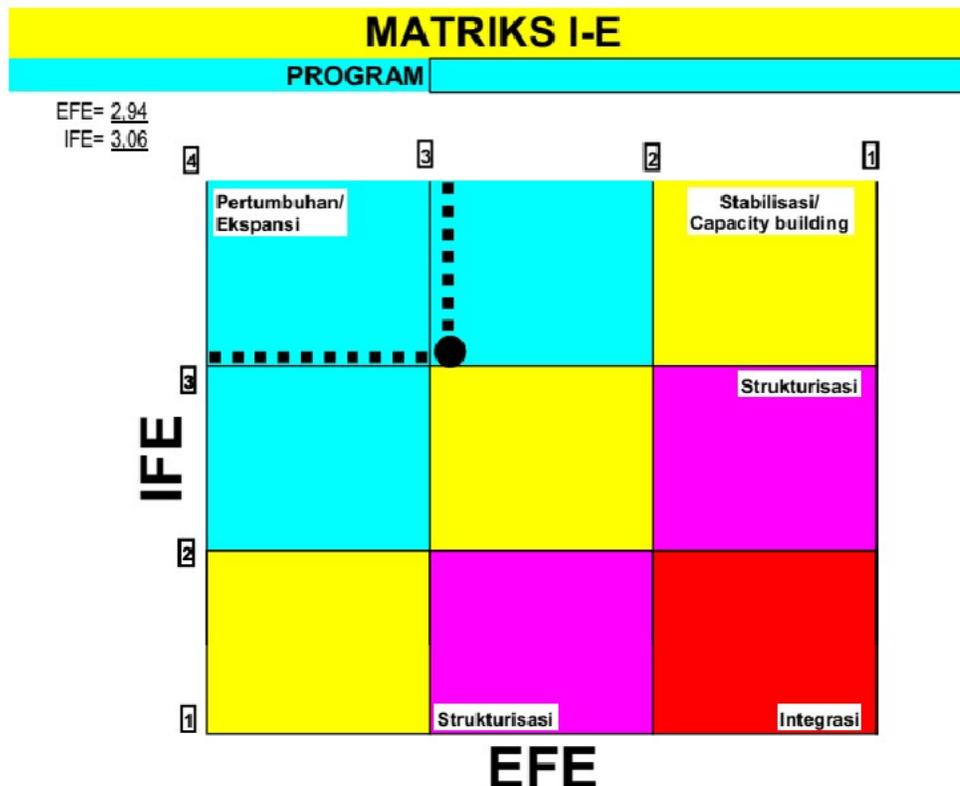
		Kekuatan:			
No	Faktor KELEMAHAN Kritis	Bobot-1	Bobot-2	Skala (1-4)	(Bobot-2)x (Skala)
1	Belum terinternalisasi nilai nilai visi bersama sebagai acuan kerja	1	0,03	1	0,03
2	Belum optimalnya sistem informasi manajemen dalam menunjang fungsi pelayanan	2	0,06	2	0,11
3	Terbatasnya jumlah SDM yang berkualifikasi sesuai kebutuhan BPFK Jakarta	1	0,03	1	0,03
4	Sistem insentif belum berbasiskan kinerja	1	0,03	1	0,03
5	Tata kelola keuangan belum Fleksibel dan mandiri	2	0,06	2	0,11
6	Sarana dan prasarana belum memadai	2	0,06	2	0,11
7	Belum optimal mekanisme penjadwalan dan respon time pelayanan	2	0,06	2	0,11
			Skor Kelemahan		0,53
	Jumlah	11	1,00		
	Total Skor IFE:				3,06

Tabel7 MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)

No	Faktor PELUANG Kritis	Bobot-1	Bobot-2	Skala (1-4)	(Bobot-2)x (Skala)
1	Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia	4	0,12	4	0,48
2	Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman	3	0,09	3	0,27
3	Bertambahnya jumlah Fasyankes yang mengajukan akreditasi	4	0,12	4	0,48
4	Adanya kewajiban pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA	2	0,06	2	0,12
5	Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alkes	4	0,12	4	0,48
		17	Skor Faktor PELUANG:		1,85

No	Faktor ANCAMAN Kritis	Bobot-1	Bobot-2	Skala (1-4)	(Bobot-2)x (Skala)
1	Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan terkait penerbitan sertifikat/laporan hasil SPA	3	0,09	3	0,27
2	Terbatasnya formasi SDM/PNS untuk penempatan di BPFK Jakarta	2	0,06	2	0,12
3	Alokasi anggaran untuk pengujian/kalibrasi di fasyankes belum menjadi prioritas	2	0,06	2	0,12
4	Terbatasnya dokumen referensi/standar acuan pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, dan inspeksi	2	0,06	2	0,12
5	Terbatasnya penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis khusus di dalam negeri	1	0,03	1	0,03
6	Belum adanya regulasi yang mewajibkan transfer teknologi SPA	1	0,03	1	0,03
7	Ketatnya persaingan dengan institusi pengujian sejenis pada lingkup nasional dan regional	2	0,06	2	0,12
8	Penerapan regulasi tentang pengujian dan kalibrasi SPA belum optimal.	3	0,09	3	0,27
	Jumlah	16	Skor Faktor TANTANGAN		1,09
	Total Skor EFE:				2,94

Gambar 2 Posisi Bersaing BPFK Jakarta



Berdasarkan matrik di atas BPFK Jakarta memiliki situasi yang sangat menguntungkan, memiliki Peluang dan Kekuatan, sehingga bila digabungkan akan memberikan manfaat berlipat ganda. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan yang ekspansif (Growth Oriented Strategy)

Rekomendasi strategi ***Growth Oriented Strategy*** :

1. Meningkatkan penguatan mutu kelembagaan.
2. Memperkuat program pelatihan peningkatan kompetensiSDM .
3. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder
4. Meningkatkan cakupan pelayanan SPA
5. Meningkatkan ruang lingkup uji profisiensi sebagai penjaminan mutu kompetensi personel internal dan external
6. Meningkatkan laboratorium menjadi standar nasional satuan ukur alat kesehatan.

G. Analisis TOWS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, BPFK Jakarta membuat langkah-langkah perencanaan strategis yang sesuai melalui kajian dan analisa dengan menggunakan tows matriks seperti dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel8 Analisa Matrik SWOT

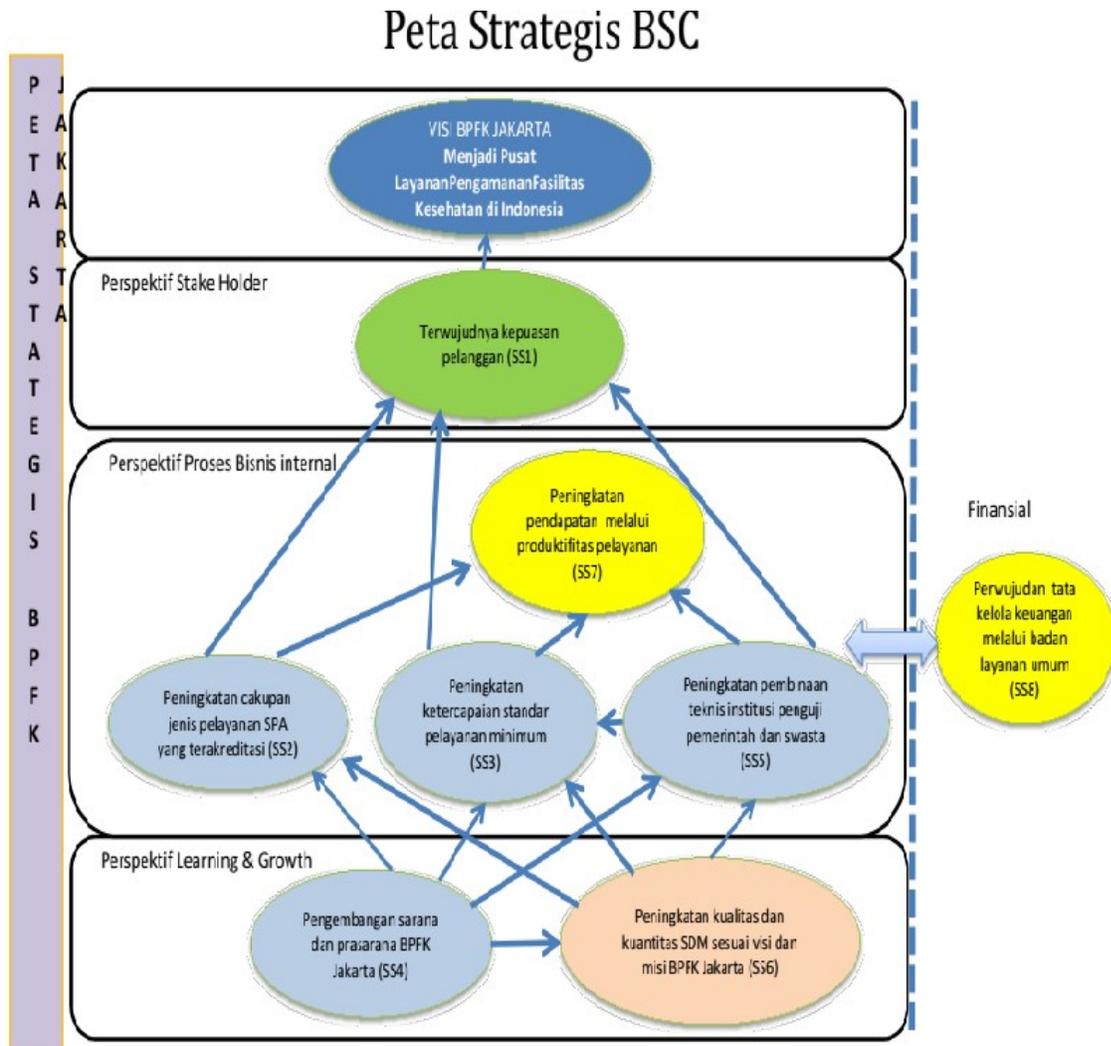
Matriks SWOT Strategi Program		
PROGRAM		
NO	FAKTOR KEKUATAN (S)	FAKTOR KELEMAHAN (W)
1	Kedudukan sebagai Instansi milik pemerintah memposisikan BPFK sebagai rujukan nasional	Belum terinternalisasi nilai nilai visi bersama sebagai acuan kerja
2	BPFK Jakarta telah memperoleh akreditasi ISO 17025 dan 17020 dari KAN	Belum optimalnya sistem informasi manajemen dalam menunjang fungsi pelayanan
3	SDM yang kompeten dan tersertifikasi	Terbatasnya jumlah SDM
4	Memiliki program peningkatan mutu SDM	Sistem insentif belum berbasis kinerja
5	Memiliki tarif yang kompetitif	Tata kelola keuangan belum Fleksibel dan mandiri
6	Memiliki peralatan yang memadai dalam segi jumlah jenis dan teknologi	Sarana dan prasarana belum memadai
7	Memiliki ruang lingkup akreditasi terbanyak dibanding institusi sejenis	Belum optimal mekanisme penjadwalan dan respon time pelayanan
NO	FAKTOR PELUANG (O)	STRATEGI KELEMAHAN + PELUANG
1	Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia	(W13 : O12345) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta
2	Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman	(W257 : O1234) Peningkatan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi
3	Bertambahnya jumlah Fasyankes yang mengajukan akreditasi	(W2456:O1234)Perwujudan tata kelola keuangan melalui badan layanan umum
4	Adanya kewajiban pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA	(W6: O1234) Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta
5	Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alkes	(W37: O12345) Peningkatan kerjasama dan perluasan jejaring kerja dengan stakeholder
NO	FAKTOR ANCAMAN/TANTANGAN (T)	STRATEGI KELEMAHAN + ANCAMAN
1	Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan terkait penerbitan sertifikat/laporan hasil SPA	(W127 : T17) Peningkatan budaya kerja dalam mewujudkan pelayanan PRIMA
2	Terbatasnya formasi SDMPNS untuk penempatan di BPFK Jakarta	(W27 : T57) Peningkatan kualitas SDM
3	Alokasi anggaran untuk pengujian/kalibrasi di fasyankes belum menjadi prioritas	
4	Terbatasnya dokumen referensi/standar acuan pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, dan inspeksi	
5	Terbatasnya penyelenggara pelatihan kompetensi teknis khusus di dalam negeri	
6	Belum adanya regulasi yang mewajibkan transfer teknologi SPA	
7	Ketatnya persaingan dengan institusi pengujian sejenis pada lingkup nasional dan regional	
8	Terbatasnya laboratorium kalibrasi alat ukur standar di Indonesia	

	FAKTOR KEKUATAN (S)	FAKTOR KELEMAHAN (W)
FAKTOR PELUANG (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (S1234567 : O1234) Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi 2. (S1 : O15) Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta 3. (S1234367 : O12345) Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan 4. S123467 : O12345) Terwujudnya kepuasan pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (W13 : O12345) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta 2. (W2456:O1234) Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel 3. (W6: O1234) Tersedianyasarana dan prasarana yang berkualitas
FAKTOR ANCAMAN(T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (S1234567 : T17) Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (W27 : T57) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta

No	Hasil kompilasi analisa TOWS
1	(S1234567 : O1234) Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi
2	(S1 : O15) Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta
3	(S1234367 : O12345) Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan
4	S123467 : O12345) Terwujudnya kepuasan pelanggan
5	(W13 : O12345) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta
6	(W2456:O1234) Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel
7	(W6: O1234) Tersedianyasarana dan prasarana yang berkualitas
8	(S1234567 : T17) Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum

H. Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC)

Berdasarkan upaya - upaya strategis yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya maka dapat disusun peta strategis BPFK Jakarta untuk kurun waktu periode RSB. Peta startegis BSC menggambarkan jalinan sebab akibat sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif finansial, stakeholder, proses bisnis dan pengembangan learning and growth.



Gambar 3 Peta rancangan BSC

Tabel 9 Sasaran Strategis BPFK Jakarta

No	Perspektif		SasaranStrategis
1.	Perspektif Stake Holder	SS1	Terwujudnya kepuasan pelanggan
2.	Perspektif Proses Bisnis Internal	SS2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi
		SS3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum
		SS5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta
		SS7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan
4.	Perspektif learning & growth	SS6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta
		SS4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas
5	Perspektif finansial	SS8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel

Tabel 10 Indikator Kinerja Utama BPFK Jakarta

No	SasaranStrategis		KPI/IKU
SS1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
SS2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI2	Jumlah ruang lingkup pelayanan
		KPI3	Penambahan ruang lingkup Akreditasi
SS3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki
SS4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI5	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator
SS5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI6	Persentase peserta uji profesiensi yg memenuhi persyaratan
SS6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	KPI7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM
SS7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan

SS8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI9	Pendapatan PNBP
		KPI10	Pemenuhan LAKIP
		KPI11	Realisasi anggaran

BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah :

“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program PNBK yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi di unit kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.

A. Matrik IKU

Matrik IKU BPFK Jakarta dirancang untuk mengetahui kemampuan mengintegrasikan indikator kinerja dalam proses kegiatan BPFK Jakarta. Dimensi tersebut harus dapat mengukur secara keseluruhan dari input kegiatan yang telah direncanakan, proses kegiatan, dan output yang dihasilkan. Kesemuanya dapat dikorelasikan oleh sebuah persamaan yang rumit yang dapat disederhanakan dengan formulasi khusus. Secara garis besar matrik Indikator Kinerja Utama BPFK Jakarta diwujudkan seperti pada table berikut :

Tabel11 Target KPI

No.	KPI	Bobot	Satuan	Baseline	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
KPI1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	74	74	75	76	77	78
KPI2	Jumlah ruang lingkup pelayanan		Jumlah	125	129	133	137	141	144
KPI3	Penambahan ruang lingkup Akreditasi		Jumlah	52	54	58	62	66	70
KPI4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki		Jumlah	32	32	40	45	46	48
KPI5	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator		%	50	55	60	65	70	75
KPI6	Persentase peserta uji profesiensi yg memenuhi persyaratan		%	78	78	79	80	81	82
KPI7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM		%	50	65	75	85	95	100
KPI8	Jumlahsertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan		Jumlah	30,020	35,000	40,000	42,000	45,000	50,000
KPI9	Pendapatan PNBPN		Jumlah	8,8 M	9 M	9,5 M	10 M	10,5 M	11 M
KPI10	Pemenuhan LAKIP		Nilai	AA	AA	AA	AA	AA	AA
KPI11	Realisasi anggaran		%	85	100	100	100	100	100

B. Kamus IKU

Perspektif	:	Stakeholder	ID : KPI1											
SasaranStrategis	:	Terwujudnya kepuasan stakeholder												
IKU/KPI	:	Indeks kepuasan pelanggan												
Definisi	:	Indeks kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPFK Jakarta												
Formula	:	Formula Perhitungan Kepuasan Eksternal mengacu kepada permenPANRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Tata Operasional												
Sumber Data	:	Sampling kuesioner pelanggan eksternal BPFK Jakarta												
PeriodePelaporan	:	Enam Bulan												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	74	74	75	76	77
2020	2021	2022	2023	2024										
74	74	75	76	77										

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI2											
SasaranStrategis	:	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi												
IKU/KPI	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan												
Definisi	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan adalah akumulasi Jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh BPFK Jakarta yang meliputi kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi												
Formula	:	Akumulasi Jumlah Jenis pelayanan BPFK Jakarta dalam tahun berjalan												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Tata Operasional												
Sumber Data	:	Evaluasi triwulan BPFK Jakarta												
PeriodePelaporan	:	3 bulan												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129</td> <td>133</td> <td>137</td> <td>141</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	129	133	137	141	144
2020	2021	2022	2023	2024										
129	133	137	141	144										

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI3											
SasaranStrategis	:	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi												
IKU/KPI	:	Penambahan ruang lingkup Akreditasi												
Definisi	:	Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi adalah jumlah jenis pelayanan yang terakreditasi sesuai persyaratan yang diberikan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang memberikan akreditasi.												
Formula	:	Jumlah penambahan ruang lingkup yang terakreditasi dalam rentang akreditasi												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Tata Operasional												
Sumber Data	:	Lembaga/instansi yang berwenang yang memberikan akreditasi												
PeriodePelaporan	:	1 Tahun												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54</td> <td>58</td> <td>62</td> <td>66</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	54	58	62	66	70
2020	2021	2022	2023	2024										
54	58	62	66	70										

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI4										
SasaranStrategis	:	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum											
IKU/KPI	:	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki											
Definisi	:	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki adalah jumlah prosedur operasional dan SOP-AP yang dibuat dan atau diperbaiki dalam kurun waktu satu tahun											
Formula	:	Akumulasi SOP yang dibuat dan atau diperbaiki dalam satu tahun											
Bobot IKU/KPI (%)	:												
Person In Charge	:	Kasie Tata Operasional & Ka.Sub.Bag. Tata Usaha											
Sumber Data	:	Evaluasi kinerja BPFK Jakarta triwulan											
PeriodePelaporan	:	3 Bulan											
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	32	40	45	46	48
2020	2021	2022	2023	2024									
32	40	45	46	48									

Perspektif	:	Perspektif Learning & Growth	ID : KPI5										
SasaranStrategis	:	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta											
IKU/KPI	:	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator											
Definisi	:	<p>Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator atau <i>Overall Equipment Effectiveness (OEE)</i> adalah hasil pengukuran keandalan alat ukur dan kalibrasi tertentu yang dilihat dari 3 aspek yaitu : ketersediaan, kinerja dan kualitas.</p> <p>A. Ketersediaan (availability) : Ke, adalah perbandingan jumlah hari Alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tsb direncanakan beroperasi</p> <p>B. Kinerja (performance) : Ki, adalah kemampuan alat yang ada Dibagi kemampuan ideal alat</p> <p>C. Kualitas (quality) : Ku, adalah keluaran yang baik yang dihasilkan oleh suatu alat dibagi dengan total keluaran dari alat tersebut</p> <p>Peralatan yang akan dilakukan penilaian minimal peralatan pengujian kalibrasi dan inspeksi yang bernilai ≥ 200 jt dan atau masuk dalam lingkup akreditasi</p>											
Formula	:	$OEE = (Ke \times Ki \times Ku) \times 100\%$											
Bobot IKU/KPI (%)	:												
Person In Charge	:	Kasie Tata Operasional & Ka.Sub.Bag. Tata Usaha											
Sumber Data	:	Evaluasi kinerja BPFK Jakarta triwulan											
Periode Pelaporan	:	3 Bulan											
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	55	60	65	70	75
2020	2021	2022	2023	2024									
55	60	65	70	75									

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI6											
SasaranStrategis	:	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta												
IKU/KPI	:	Persentase peserta uji profisiensi yg memenuhi persyaratan												
Definisi	:	Persentase peserta uji profisiensi yg memenuhi persyaratan adalah persentase peserta uji profisiensi yang melakukan pengambilan data dan menyerahkan hasil.												
Formula	:	Peserta uji profisiensi yang menyerahkan hasil dibagi peserta yang melakukan pengambilan data dikali 100%												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Kasie Tata Operasional												
Sumber Data	:	Penyelenggaraan Uji Profisiensi												
PeriodePelaporan	:	1 Tahun												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	78	79	80	81	82
2020	2021	2022	2023	2024										
78	79	80	81	82										

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI7										
SasaranStrategis	:	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta											
IKU/KPI	:	Persentase pemenuhan kompetensi SDM											
Definisi	:	Persentase pemenuhan kompetensi SDM adalah persentase SDM yang memperoleh sertifikat kompetensi dibidangnya											
Formula	:	Jumlah SDM yang mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi dikalikan 100%											
Bobot IKU/KPI (%)	:												
Person In Charge	:	Seksi Kemitraan & Bimbingan Teknis											
Sumber Data	:	Seksi dan Instalasi kerja terkait											
PeriodePelaporan	:	1 Tahunan											
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	65	75	85	95	100
2020	2021	2022	2023	2024									
65	75	85	95	100									

Perspektif	:	Perspektif Proses Bisnis Internal	ID : KPI8										
SasaranStrategis	:	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan											
IKU/KPI	:	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan											
Definisi	:	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan Adalah Jumlah sertifikat/laporan hasil uji pelayanan BPFK Jakarta, kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi yang diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun.											
Formula	:	Jumlah sertifikat/laporan hasil uji pelayanan BPFK Jakarta, yang diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun.											
Bobot IKU/KPI (%)	:												
Person In Charge	:	Kasie Pelayanan Teknis											
Sumber Data	:	Evaluasi Kinerja Triwulan BPFK Jakarta											
PeriodePelaporan	:	3 Bulan											
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.000</td> <td>40.000</td> <td>42.000</td> <td>45 000</td> <td>50 000</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	35.000	40.000	42.000	45 000	50 000
2020	2021	2022	2023	2024									
35.000	40.000	42.000	45 000	50 000									

Perspektif	:	Perspektif finansial	ID : KPI9										
Sasaran Strategis	:	Perwujudan tatakelola keuangan yang akuntabel											
IKU/KPI	:	Pendapatan PNB											
Definisi	:	Pendapatan PNB adalah realisasi pendapatan yang bersumber dari pelayanan BPFK Jakarta dalam kurun waktu satu tahun											
Formula	:	Jumlah Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak											
Bobot IKU/KPI (%)	:												
Person In Charge	:	Ka. Sub.Bag. Tata Usaha											
Sumber Data	:	Evaluasi Kinerja Triwulan BPFK Jakarta											
Periode Pelaporan	:	3 Bulan											
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 M</td> <td>9,5 M</td> <td>10 M</td> <td>10,5 M</td> <td>11 M</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	9 M	9,5 M	10 M	10,5 M	11 M
2020	2021	2022	2023	2024									
9 M	9,5 M	10 M	10,5 M	11 M									

Perspektif	:	Perspektif financial	ID : KPI10											
SasaranStrategis	:	Perwujudan tatakelola keuangan yang akuntabel												
IKU/KPI	:	Pemenuhan LAKIP												
Definisi	:	Pemenuhan LAKIP adalah capaian Akuntabilitas kinerja yang memenuhi kriteria karakteristik/kualitatif berdasarkan regulasi yang berlaku												
Formula	:	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Ka.Sub.Bag. Tata Usaha												
Sumber Data	:	Evaluasi Kinerja Tahunan BPFK Jakarta												
PeriodePelaporan	:	1 Tahun												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>AA</td> <td>AA</td> <td>AA</td> <td>AA</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	AA	AA	AA	AA	AA
2020	2021	2022	2023	2024										
AA	AA	AA	AA	AA										

Perspektif	:	Perspektif financial	ID : KPI11											
SasaranStrategis	:	Perwujudan tatakelola keuangan yang akuntabel												
IKU/KPI	:	Realisasi anggaran												
Definisi	:	Realisasi anggaran adalah Persentase realisasi Pelaksanaan anggaran belanja BPFK Jakarta yang terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam kurun waktu satu tahun												
Formula	:	Jumlah anggaran yang digunakan dalam waktu satu tahun dibagi jumlah pagu dikali 100%												
Bobot IKU/KPI (%)	:													
Person In Charge	:	Ka.Sub.Bag. Tata Usaha												
Sumber Data	:	Evaluasi Kinerja Triwulan BPFK Jakarta												
PeriodePelaporan	:	3 bulan												
Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	100%	100%	100%	100%	100%
2020	2021	2022	2023	2024										
100%	100%	100%	100%	100%										

C. Program Kerja Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Maka dilakukan program-program kerja strategis BPFK Jakarta seperti terlihat pada table dibawah ini :

Tabel12 Program kerja strategis

ID	KPI	PROGRAM KERJA STRATEGIS				
		2020	2021	2022	2023	2024
KPI1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Umpan balik dan temu pelanggan	Umpan balik dan temu pelanggan	Umpanbalik dan temupelanggan	Umpanbalik dan temupelanggan	Umpanbalik dan temupelanggan
KPI2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhanperalatanstandar b. Pembuatan metode dan lembar kerja c. Implementasi Metode kerja d. Pemenuhan buku standar e. Pertemuan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> f. Pemenuhan peralatan standar g. Pembuatan metode dan lembar kerja h. Implementasi Metode kerja i. Pemenuhan buku standar Pertemuan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> j. Pemenuhanperalatanstandar k. Pembuatanmetode dan lembarkerja l. ImplementasiMetodekerja m. Pemenuhanbukustandar Pertemuanteknis 	<ul style="list-style-type: none"> n. Pemenuhanperalatanstandar o. Pembuatanmetode dan lembarkerja p. ImplementasiMetodekerja q. Pemenuhanbukustandar Pertemuanteknis 	<ul style="list-style-type: none"> r. Pemenuhanperalatanstandar s. Pembuatanmetode dan lembarkerja t. ImplementasiMetodekerja u. Pemenuhanbukustandar Pertemuanteknis
KPI3	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> v. Memelihara akreditasi ISO/IEC 17025 /IEC 17020 dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan jasa w. Pemenuhan peralatan standar x. Pembuatan metode dan lembar kerja y. Implementasi Metode kerja z. Pemenuhan buku standar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeliharaakreditasi ISO/IEC 17025 /IEC 17020 dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan jasa b. Pemenuhan peralatan standar c. Pembuatan metode dan lembar kerja d. Implementasi Metode kerja e. Pemenuhan buku standar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeliharaakreditasi ISO/IEC 17025 /IEC 17020 dan melakukanperbaikanberkelanjutandalampelayananjasa b. Pemenuhanperalatanstandar c. Pembuatanmetode dan lembarkerja d. ImplementasiMetodekerja e. Pemenuhanbukustandar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeliharaakreditasi ISO/IEC 17025 /IEC 17020 dan melakukanperbaikanberkelanjutandalampelayananjasa b. Pemenuhanperalatanstandar c. Pembuatanmetode dan lembarkerja d. ImplementasiMetodekerja e. Pemenuhanbukustandar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeliharaakreditasi ISO/IEC 17025 /IEC 17020 dan melakukanperbaikanberkelanjutandalampelayananjasa b. Pemenuhanperalatanstandar c. Pembuatanmetode dan lembarkerja d. ImplementasiMetodekerja e. Pemenuhanbukustandar
KPI4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Program penyempurnaan 5 SOP	Program penyempurnaan 5 SOP	Program penyempurnaan 5 SOP	Program penyempurnaan 5 SOP	Program penyempurnaan 5 SOP

KPI5	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Program pemeliharaan dan rekalisasi alat ukur standar	Program pemeliharaan dan rekalisasi alat ukur standar	Program pemeliharaan dan rekalisasi alat ukur standar	Program pemeliharaan dan rekalisasi alat ukur standar	Program pemeliharaan dan rekalisasi alat ukur standar
KPI6	Persentase peserta uji profesi yang memenuhi persyaratan	Uji Profisiensi antar Lab (Uji Banding Lab Kalibrasi, pengujian dan inspeksi)	Uji Profisiensi antar Lab (Uji Banding Lab Kalibrasi, pengujian dan inspeksi)	Uji Profisiensi antar Lab (Uji Banding Lab Kalibrasi, pengujian dan inspeksi)	Uji Profisiensi antar Lab (Uji Banding Lab Kalibrasi, pengujian dan inspeksi)	Uji Profisiensi antar Lab (Uji Banding Lab Kalibrasi, pengujian dan inspeksi)
KPI7	Prosentasi pemenuhan kompetensi SDM	Program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal/eksternal dan uji kompetensi	Program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal/eksternal dan uji kompetensi	Program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal/eksternal dan uji kompetensi	Program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal/eksternal dan uji kompetensi	Program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal/eksternal dan uji kompetensi
KPI8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Persiapan membangun aplikasi e-certificate	Membangun aplikasi e-certificate tahap I	Membangun aplikasi e-certificate tahap II	Membangun aplikasi e-certificate tahap III	Membangun aplikasi e-certificate tahap IV
KPI9	Pendapatan PNB	Program peningkatan pendapatan PNB a. Diseminasi b. MOU c. Pembuatan atau revisi pola tarif	Program peningkatan pendapatan PNB d. Diseminasi e. MOU f. Pembuatan atau revisi polatarif	Program peningkatan pendapatan PNB f. Diseminasi g. MOU h. Pembuatan atau revisi polatarif	Program peningkatan pendapatan PNB h. Diseminasi i. MOU j. Pembuatan atau revisi polatarif	Program peningkatan pendapatan PNB j. Diseminasi k. MOU l. Pembuatan atau revisi polatarif
KPI10	Pemenuhan LAKIP	Program Peningkatan akuntabilitas 1. Perencanaan 2. Monitoring 3. Evaluasi	Program Peningkatan akuntabilitas 4. Perencanaan 5. Monitoring 6. Evaluasi	Program Peningkatan akuntabilitas 6. Perencanaan 7. Monitoring 8. Evaluasi	Program Peningkatan akuntabilitas 8. Perencanaan 9. Monitoring 10. Evaluasi	Program Peningkatan akuntabilitas 10. Perencanaan 11. Monitoring 12. Evaluasi
KPI11	Realisasi anggaran	Program penyempurnaan sistem perencanaan dan kontrol 12. Perencanaan 13. Monitoring 14. Evaluasi	Program penyempurnaan sistem perencanaan dan kontrol 15. Perencanaan 16. Monitoring	Program penyempurnaan sistem perencanaan dan kontrol 17. Perencanaan 18. Monitoring	Program penyempurnaan sistem perencanaan dan kontrol 19. Perencanaan 20. Monitoring	Program penyempurnaan sistem perencanaan dan kontrol 21. Perencanaan 22. Monitoring

			Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi
--	--	--	----------	----------	----------	----------

BAB V

ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan merealisasikan visi BPFK Jakarta terdapat risiko yang akan dihadapi. Risiko dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat menghalangi terwujudnya sasaran strategis. Risiko dapat bersumber dari aspek finansial dan nonfinansial.

A. Identifikasi Risiko

Risiko yang dapat dialami oleh BPFK Jakarta untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu RSB, dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 13 Identifikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	RISIKO
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	Kepuasan pelanggan tidak tercapai karena Tingginya complain <i>stakeholder</i> terhadap layanan BPFK Jakarta
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	Gagal mengajukan akreditasi penambahan lingkup pelayanan
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	Lemahnya pengawasan pelaksanaan tata hubungan kerja
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	Pengembangan sarana dan prasarana tidak tercapai karena Terbatasnya anggaran
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta tidak maksimal
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tidak maksimal dikarenakan kurangnya institusi penyelenggara pelatihan sesuai kompetensi
7	Peningkatan pendapatan melalui produktivitas pelayanan	Target Pendapatan Tidak tercapai
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	Target LAKIP tidak tercapai karena adanya perubahan kebijakan dalam tahun anggaran berjalan

B. Penilaian Tingkat Risiko

Penilaian tingkat risiko adalah pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkatke mungkin kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis. Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel14Penilai Tingkat Risiko

No	SasaranStrategis	RISIKO	Kemungkinanre sikoterjadi	Dampakresiko	Tingkat Resiko	Warna
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	Tingginya complain <i>stakeholder</i> terhadap layanan BPFK Jakarta	Besar	medium	Tinggi	T
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	Gagal mengajukan akreditasi penambahan lingkup pelayanan	kecil	Mayor	Tinggi	T
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	Lemahnya pengawasan pelaksanaan tata hubungan kerja	Kecil	Medium	Moderat	M
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	Pengembangan sarana dan prasarana tidak tercapai karena Terbatasnya anggaran	Sedang	Minor	Moderat	M
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta tidak maksimal	Kecil	Minor	Rendah	R
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tidak maksimal dikarenakan kurangnya institusi penyelenggara pelatihan sesuai kompetensi	Kecil	Minor	Rendah	R
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	Target Pendapatan Tidak tercapai	Sedang	Minor	Moderat	M
8	Perwujudan tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	Target LAKIP tidak tercapai karena adanya perubahan kebijakan dalam tahun anggaran	Sedang	Medium	Tinggi	T

		berjalan				
--	--	----------	--	--	--	--

Keterangan E = Risiko Ekstrim, T= Risiko Tinggi, M= Risiko Moderat, R= Risiko Rendah

Penilaian Dampak		Penilaian kemungkinan terjadi				
Nilai	Konsekuensi /Dampak	Kemungkinan Terjadi	Kejadian berulang	Kejadian Tunggal		
1	Tidak Penting	I (Sangat Besar)	Kemungkinan terjadi > 80sd 100%	Diabaikan, Probabilitas kecil, mendekati nol		
2	Minor	II (Besar)	Mungkin terjadi antara 60% sd 80%	Kecil kemungkinan tapi tidak diabaikan		
3	Medium	III (Sedang)	Mungkin terjadi antara 40% sd 60%	Kemungkinan kurang dari 50%, tapi masih cukup besar		
4	Mayor	IV (Kecil)	Mungkin terjadi antara 20% sd 40%	Probabilitas 50/50		
5	Malapetaka	V (Sangatkecil)	Mungkin terjadi antara 0% sd 20%	Kemungkinan terjadi lebih dari 50%		
			Mempengaruhi sasaran strategis			

Dampak Risiko							
Status Risiko		1	2	3	4	5	
Nilai	Kemungkinan	Tidak Penting	Minor	Medium	Mayor	Malapetaka	Keterangan
5	I (Sangat Besar)	5	10	15	20	25	Rendah
4	II (Besar)	4	8	12	16	20	Moderat
3	III (Sedang)	3	6	9	12	15	Tinggi
2	IV (Kecil)	2	4	6	8	10	Ekstrim
1	V (Sangatkecil)	1	2	3	4	5	

C. Rencana Mitigasi Risiko

Rencana Mitigasi risiko merupakan upaya nyata BPFK Jakarta untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategis. Rencana mitigasi yang disusun diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali BPFK Jakarta. Tabel berikut ini menggambarkan sasaran strategis, risiko, tingkat risiko, dan rencana mitigasinya khususnya untuk menangani level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko atau memperkecil atau meniadakan dampak suatu risiko.

Tabel15 Rencana Mitigasi Risiko

No	Sasaran Strategis	RISIKO	Mitigasi Risiko
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	Tingginya complain <i>stakeholder</i> terhadap layanan BPFK Jakarta	Membuat kegiatan bulan mutu yaitu temu pelanggan untuk melakukan pemetaan keluhan dan mencari solusi yang tepat
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	Gagal mengajukan akreditasi penambahan lingkup pelayanan	Menyiapkan semua persyaratan dan memantau proses akreditasi untuk memastikan berjalan sebagaimana mestinya.
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	Lemahnya pengawasan pelaksanaan tata hubungan kerja	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) yang berkesinambungan
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	Pengembangan sarana dan prasarana tidak tercapai	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan kegiatan
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta tidak maksimal	Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis, jejaring kerja dan kemitraan kepada institusi pengujian pemerintah dan swasta serta dinas Kesehatan
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tidak maksimal dikarenakan kurangnya institusi penyelenggara pelatihan sesuai kompetensi	Menyelenggarakan pelatihan secara inhouse dengan narasumber internal yang berpengalaman, dan menjalin kerjasama dengan organisasi profesi atau Bapelkes/BBPK sebagai pengampu akreditasi
7	Peningkatan pendapatan melalui produktivitas pelayanan	Target Pendapatan tidak tercapai	Melakukan jejaring kemitraan dengan rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta dalam rangka MoU layanan
8	Perwujudan tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	Nilai LAKIP AA tidak tercapai	Meningkatkan mutu koordinasi antar pemangku kebijakan internal dalam menyusun Rencana dan Aksi Kegiatan

BAB VI

PROYEKSI FINASIAL

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta telah dibahas pada Bab 4. Program dan kegiatan tersebut akan terealisasi jika tersedia pembiayaan yang mencukupi. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan BPFK Jakarta lebih banyak tergantung dari sumber penerimaan rupiah murni. Untuk masa mendatang sumber pembiayaan yang berasal dari rupiah murni tidak dapat diandalkan untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, BPFK Jakarta perlu berupaya memaksimalkan sumber penerimaan yang bukan berasal dari rupiah murni.

Secara garis besar, sumber penerimaan BPFK Jakarta diluar rupiah murni berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

A. Estimasi Pendapatan

Dalam rangka mengembangkan pendapatan, BPFK Jakarta juga perlu memaksimalkan kinerja laboratorium yang sudah ada, merupakan asset yang menghasilkan pendapatan legal dan efektif. Jika didukung oleh kebijakan pengelolaan yang baik, investasi yang memadai, dan manajemen yang kuat akan memberikan dampak yang besar baik naiknya pendapatan BPFK Jakarta. Ketersediaan lahan BPFK Jakarta yang relative luas dan tersebar di 9 propinsi dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan BPFK Jakarta.

Sumber pendapatan yang digunakan oleh BPFK Jakarta diperoleh dari pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPFK Jakarta. Berdasarkan pada data perolehan dana, maka estimasi pendapatan BPFK Jakarta untuk kurunwaktu 2020-2024 terlihat pada table berikut :

Tabel16 Estimasi Pendapatan BPFK Jakarta

TAHUN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Anggaran	Realisasi								
Pendapatan Negara Bukan Pajak	8.000.000.000	9.028.708.420	8.500.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Rupiah Murni & PNBP	36.977.450.000	29.360.095.300	40.685.943.000	38.651.645.850	44.754.537.300	42.516.810.435	49.229.991.030	46.768.491.479	54.152.990.133	51.445.340.626

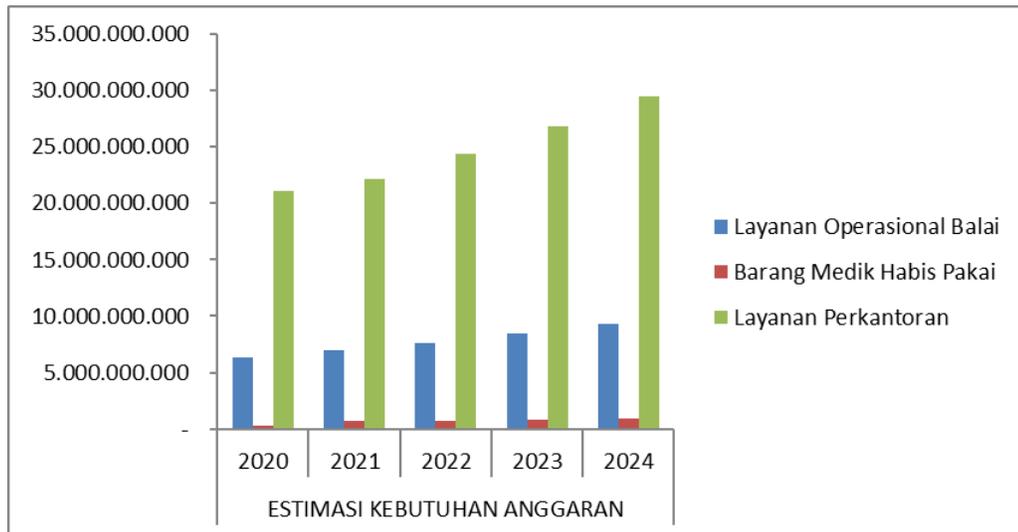
B. Rencana Kebutuhan Anggaran

Penggunaan dana BPFK Jakarta dialokasikan dalam 2 (dua) kategori program besar yakni (1) belanja operasional rutin, dan (2) belanja pengembangan dan transformasi BPFK Jakarta. Untuk kurun waktu tahun 2020-2024 direncanakan anggaran sebagaimana terlihat pada Grafik dan table berikut:

1. Anggaran Program Kelangsungan Operasi

Berdasarkan rencana alokasi anggaran ini, kemudian disusun rincian penganggaran untuk masing-masing kelompok program sesuai dengan pemetaan rencana strategis yang telah dirancang. Pada bagian operasional rutin, diberikan bentuk-bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait dari masing-masing pos anggaran. Pos-pos anggaran kelangsungan operasional disusun berdasarkan aturan penganggaran yang sudah dijalankan oleh BPFK Jakarta.

Grafik21 Estimasi Anggaran Operasional 2020-2024



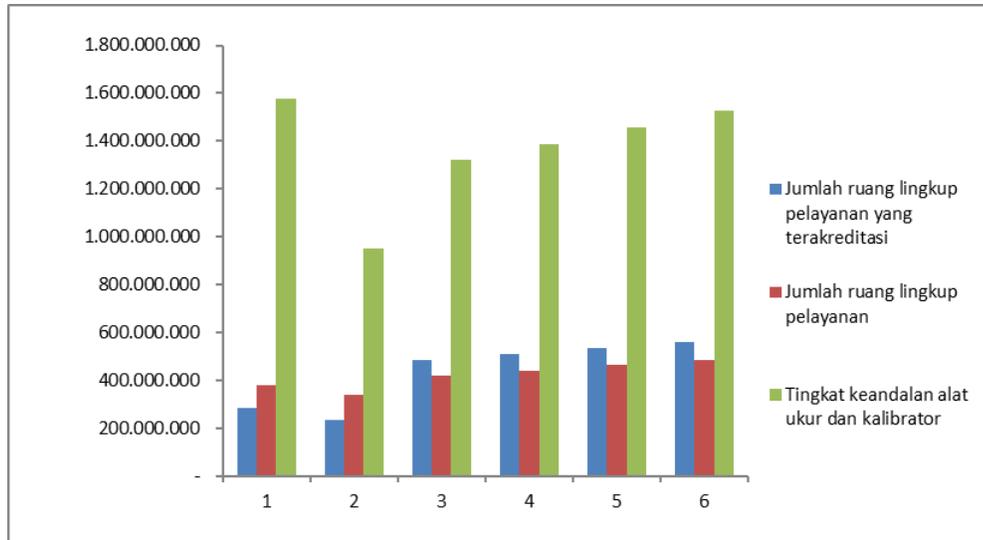
tabel 17 Estimasi anggaran operasional selama lima tahun periode RENSTRA

NO	JENIS KEGIATAN	BASE LINE 2019	ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan Operasional Balai	5.458.866.463	6.338.062.000	6.955.901.000	7.651.491.100	8.416.640.210	9.258.304.231
2	Barang Medik Habis Pakai	4.409.636.475	325.156.000	682.350.000	750.585.000	825.643.500	908.207.850
3	Layanan Perkantoran	7.815.813.120	21.110.250.000	22.172.599.000	24.389.858.900	26.828.844.790	29.511.729.269

2. Anggaran Program Pengembangan

Pada bagian pengembangan dan transformasi, alokasi anggaran diberikan pada masing-masing pos anggaran sesuai dengan program strategis yang diberikan pada Bab 4. Pada alokasi anggaran kelompok program transformasi juga diberikan bentuk kegiatan dan unit-unit kerja terkait.

Grafik3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan 2020-2024



Tabel18 Estimasi anggaran program pengembangan selama lima tahun periode RSB

NO	NAMA PROGRAM STRATEGIS	BASE LAIN TAHUN 2019	ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
A. Pencapaian IKU							
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	286.532.000	232.868.000	485.398.000	509.667.900	535.151.295	561.908.860
KPI.3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	381.432.000	340.537.000	419.818.000	440.808.900	462.849.345	485.991.812
KPI.5	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	1.576.249.000	951.203.000	1.320.306.000	1.386.321.300	1.455.637.365	1.528.419.233
KPI.6	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	53.634.000	132.962.000	194.682.000	204.416.100	214.636.905	225.368.750
KPI.7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	236.292.000	359.962.000	421.812.000	442.902.600	465.047.730	488.300.117
KPI.10	Pemenuhan LAKIP	109.430.000	24.600.000	145.244.000	152.506.200	160.131.510	168.138.086
NO	NAMA PROGRAM STRATEGIS	BASE LAIN TAHUN 2019	ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
B. Mitigasi Resiko							
1	Terwujudnya Kepuasan Pelanggan	55.122.000	78.730.000	86.440.000	90.762.000	95.300.100	100.065.105
2	Terwujudnya Perbaikan Alur dan SOP Pelayanan dan Manajemen	142.680.000	170.210.000	292.636.000	307.267.800	322.631.190	338.762.750
3	Terwujudnya Kemitraan Strategis Dalam Transfer Teknologi	206.642.000	466.199.000	195.457.000	205.229.850	215.491.343	226.265.910
4	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	129.390.000	194.213.000	230.572.000	242.100.600	254.205.630	266.915.912

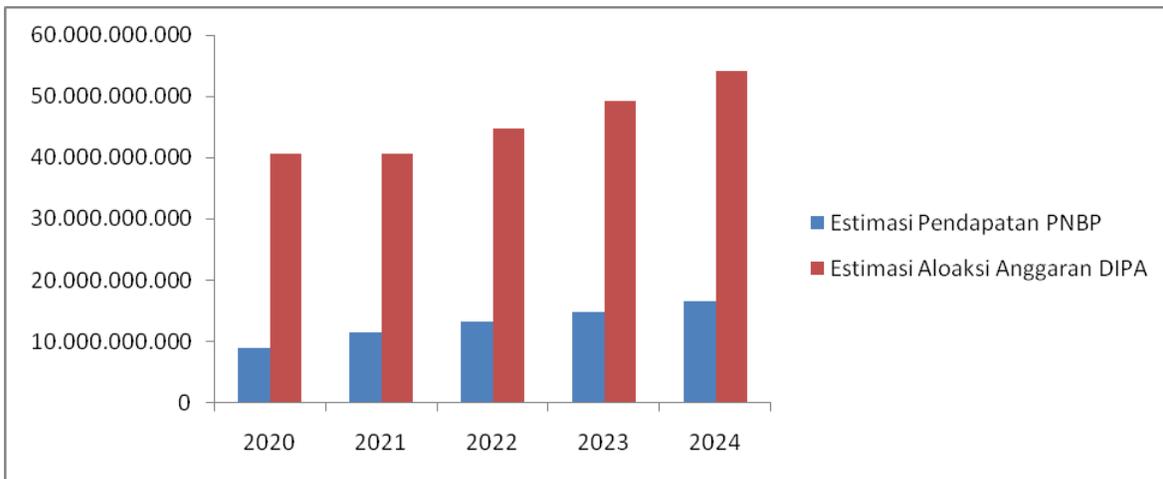
3. Rencana Pendanaan

Ketersediaan dana dari pemerintah serta kemampuan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam mengelola PNBP dari Sarana Pelayanan Kesehatan adalah pendukung utama dari keberlangsungan dan kinerja BPFK Jakarta. Merujuk pada kinerja BPFK Jakarta dan target-target yang telah diuraikan pada Bab 4, Rencana Pendanaan BPFK Jakarta 2020-2024 diperlihatkan melalui tabel dan gambar berikut ini :

Tabel19 Rencana pendanaan

TAHUN	BASE LINE 2019	Alokasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
Estimasi Pendapatan PNBP	8.895.665.400	9.000.000.000	11.497.144.143	13.264.501.428	14.936.845.571	16.597.794.914
Estimasi Aloaksi Anggaran DIPA	40.810.947.976	40.585.450.000	40.685.943.000	44.754.537.300	49.229.991.030	54.152.990.133

Grafik4Grafik Rencana Pendanaan



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta bertujuan memberikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan prioritas tindakan selama lima tahun kedepan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan. Renstra ini juga bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-4 (2020-2024).

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BPFK Jakarta melakukan evaluasi dari renstra sebelumnya untuk menghasilkan rancangan yang berkesesuaian dengan RPJPK 2005 – 2025 dan visi, misi dan program Ditjen Pelayanan Kesehatan.
2. Rencana Strategis BPFK Jakarta merupakan perjanjian kerja atau kesanggupan Kepala Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Direktur Ditjen Pelayanan Kesehatan.
3. Rencana Strategis BPFK Jakarta ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran kinerja saat ini, Arah dan prioritas strategis, Indikator kinerja utama dan program kerja strategis, Analisa dan mitigasi risiko, dan Proyeksi finansial.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.